

# Tito, Polri dan Pemberantasan Korupsi



VISHNU JUWONO

Dosen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi UI dan Kandidat Doktor di London School of Economics and Political Science (LSE)

residen Joko Widodo (Jokowi) akhirnya melantik Jenderal Polisi Tito Karnavian, Rabu (13/7) lalu, di Istana Negara sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dalam acara pelantikan Kapolri tersebut, melantiknya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya pelaksanaan reformasi internal untuk menyelamatkan wajah Polri. Melalui artikel ini, penulis akan memfokuskan pada salah satu agenda reformasi Polri yang mendesak terkait dengan pemberantasan korupsi di Indonesia. Ini akan menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi beliau saat secara resmi mengambil alih tongkat komando pimpinan Polri dari Jenderal Badrodin Haiti.

Terlepas dari kemajuan dalam mempertahankan sistem demokrasi setelah hampir 20 tahun belakangan ini, reformasi sistem penegakan hukum salah satu sektor yang tidak mengalami kemajuan signifikan. Dalam survei yang dilakukan oleh *the World Global Justice* terhadap 100.000 keluarga dan 2400 ahli mengenai pengalaman praktis terkait penegakan

hukum, Indonesia hanya memperoleh skor 0,52 (tinggi 1) dan menempati peringkat ke-52 dari 102 negara yang disurvei. Dalam komponen absennya korupsi pada kepolisian/militer, Indonesia hanya memperoleh skor 0,43. Sedangkan dalam Indeks Kebebasan (*Freedom Index*) tahun 2016 yang menempatkan Indonesia dalam kategori negara sebagian bebas (*partly free*), pada komponen penegakan hukum Indonesia mendapat skor terendah, yakni 5 dari nilai maksimum 16.

## Polri dan Kasus Korupsi

Polisi melepaskan diri dari militer yang waktu itu dikenal dengan nama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada 1999, merupakan salah satu mandat reformasi yang ingin mengurangi dominasi militer yang sangat berkuasa di masa Orde Baru. Posisi polisi secara politik menjadi lebih kuat dengan disahkannya Undang-Undang Kepolisian Nomor 2/2002. Namun dalam perjalanannya berbagai kontrol versi muncul dalam konteks penanganan kasus korupsi besar yang melibatkan petinggi Polri, dan juga konflik dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada masa Kapolri Sutanto (2005-2008) terdapat beberapa usaha penertiban dalam organisasi kepolisian saat menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan para petinggi polisi. Hasilnya pada kasus penembakan *filet letter of credit* dari Bank Nasional Indonesia (BNI), untuk pertama kalinya di era reformasi

petinggi polisi bintang tiga dan beberapa perwira tingginya divonis bersalah oleh pengadilan karena kasus korupsi.

Dengan semakin berfungsinya KPK di era periode pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009), lagi-lagi beberapa kasus korupsi melibatkan beberapa perwira tinggi polisi. Pertama kalinya mantan kapolri dan jenderal polisi bintang empat divonis bersalah atas dugaan pungutan liar saat menjabat sebagai duta besar Malaysia. Dan pada masa periode kedua Presiden SBY (2009-2014), KPK lagi-lagi mengungkapkan kasus korupsi yang melibatkan perwira tinggi Polri.

Dalam kasus pengadaan mesin *driving simulator* untuk penguasaan surat izin mengemudi (SIM), mantan kepala Korlantas divonis bersalah karena menurut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diduga terdapat kerugian baginya sebesar Rp121 miliar. Dalam kasus ini terdapat eskalasi konflik antara KPK dan polisi yang menyebabkan Presiden SBY turun tangan dalam menurunkan tensi politik antara kedua institusi yang dipicu oleh upaya penangkapan penyidik KPK Novel Baswedan.

Sementara di awal era Presiden Jokowi yang baru dilantik pada Oktober 2014, lagi-lagi konflik antara KPK dan polisi kembali timbul. KPK yang saat itu yang dipimpin oleh Abraham Samad menetapkan calon kapolri Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka. Namun pada akhirnya, pergantian Ja-

karta Selatan mengugurkan status tersangka BG tersebut. Namun, kejadian itu membawa implikasi politik selanjutnya di mana dua pimpinan KPK, Bambang Widjajanto dan Abraham Samad, dijadikan tersangka oleh polisi. Keduanya terjerat kasus lama. Namun setelah kasus ini dilimpahkan kepada Kejaksaan, Jaksa Agung Prasetyo akhirnya memutuskan untuk mengesampingkan perkara (*deponering*) dari Bambang dan Abraham atas nama kepentingan publik yang lebih luas pada Maret 2016.

## Identifikasi Masalah Polri

Berbagai macam studi yang telah dilakukan mencoba mengidentifikasi berbagai masalah di dalam institusi Polri. Dalam laporan yang diterbitkan oleh International Crisis Group (ICG) pada 2012, berargumen bahwa budaya militer masih teramat kuat di institusi kepolisian sehingga fungsi pelayanan masyarakat menjadi tidak maksimal. Selain itu, juga ICG mengidentifikasi masalah kualitas SDM di dalam kepolisian dimana akibat rekrutmen yang tidak transparan dan akuntabel, sehingga sulit untuk menanamkan budayanya secara profesional.

Kasus yang dilakukan oleh Jacquel Bator dalam artikelnya berjudul *the Rhizome State: "Democratizing Indonesian Rhizome State"* (*Democratizing Indonesian Rhizome State: "Democratizing Indonesian Rhizome State"*) (2015), mengkritik tindakan bahwa kekorangan biaya operasional dalam organisasi telah memondokkan internal bagi polisi perwira un-

tuk berjiwa "kewirusahaan" guna menutupi kekurangan dana tersebut. Akibatnya aktivitas ekonomi tidak resmi inilah, maka sistem organisasi kepolisian menjadi disfungsi. Sementara temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Akademi Selandia Baru John W. Buttle and Sharyn Graham Davies bersama dengan Adrianus Meliala dari UI yang berjudul "A Cultural Constraint Theory of police corruption: Understanding the persistence of police corruption in contemporary Indonesia (2015)" adalah polisi tidak bisa disalahkan sepenuhnya terhadap korupsi yang timbul di institusi mereka. Menurut John W. Buttle dkk., norma dan kebiasaan di dalam masyarakat Indonesia - misalnya dengan membayar snap-turut memperkuat praktik korupsi di kepolisian.

Tentu saja Tito sangat menyadari berbagai masalah di tubuh kepolisian tersebut. Sesuai dilantik, dia berjanji untuk mengurangi budaya koruptif institusi Polri, yang salah satunya dengan mewajibkan pelaporan harta kekayaan para pejabat Polri, meski dilakukan secara bertahap. Dari segi penguatan, kualifikasi akademis, pengalaman dan prestasinya di atas kertas, seharusnya, Tito mampu mendorong reformasi kepolisian yang lebih progresif dibandingkan pendahulunya. Oleh karena itu, kualitas kepemimpinan beliau akan menjadi kunci untuk dapat merealisasikan perubahan tersebut dengan tingkat resistensi yang minimal baik dari pihak internal maupun eksternal Polri. ●